



# 2022

# POLICY BRIEF

## Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika

### Vol.4 No.3, 2022

## Kemandirian Ekonomi Pesantren Berbasis Pertanian

Mohammad Iqbal Irfany<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Departemen Ilmu Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB University.

\*Email: iqbal.irfany@apps.ipb.ac.id

### Isu Kunci

- Pesantren dapat berperan dalam pemberdayaan ekonomi berbasis pertanian.
- Dalam menjalankan aktifitas usaha, aspek kekuatan dan peluang yang dimiliki pesantren lebih tinggi daripada kelemahan dan ancaman.
- Kemandirian ekonomi pesantren tergantung pada aspek kelembagaan, produksi, sinergitas dengan *stakeholder*, dan pasar.
- Penguatan bisnis pesantren dilakukan dengan menghasilkan produk yang kompetitif, pembukaan akses pasar (*market place*), dan sustainabilitas usaha pesantren dalam SDM, manajemen, dan lingkungan.

### Ringkasan

*Pesantren, sebagai institusi pendidikan khas Indonesia, tidak hanya sebagai lembaga pendidikan dan penyiaran agama, namun bisa ditingkatkan peranannya dalam pemberdayaan ekonomi, termasuk dalam sektor pertanian. Kemandirian ekonomi pesantren adalah kemampuan pesantren dalam menjalankan kegiatan ekonomi tanpa bergantung pada pihak eksternal. Berbagai studi menunjukkan bahwa dalam menjalankan aktifitas usaha, aspek kekuatan dan peluang yang dimiliki pesantren lebih tinggi daripada kelemahan dan ancaman. Adapun kemandirian ekonomi pesantren dipengaruhi oleh aspek kelembagaan, produksi, sinergitas dengan stakeholder, dan pasar hasil pertanian. Dalam hal ini, pesantren harus menghasilkan produk khas yang kompetitif, ditunjang oleh pembukaan akses pasar, sustainabilitas sumber daya manusia, manajemen, kelembagaan dan lingkungan.*

## Pendahuluan

Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia menurut *World Population Review* (2021), Indonesia memiliki banyak lembaga pendidikan Islam khas Nusantara yaitu pondok pesantren. Bahkan dapat dikatakan pesantren merupakan salah satu sistem pendidikan yang lebih dahulu daripada sistem berbasis sekolah dan dianggap sebagai produk budaya asli Indonesia (Azra 2005).

Pesantren secara umum berfungsi sebagai institusi pendidikan dan dakwah (penyiaran agama). Dalam perkembangannya, kedua fungsi ini kemudian melebar perannya termasuk dalam aktifitas pemberdayaan masyarakat. Peranan pesantren dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan di segala bidang termasuk dalam bidang ekonomi (Nadzir 2015). Hal ini pun ditegaskan dalam UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Selama ini pondok pesantren dilabeli sebagai lembaga yang operasional ekonominya berasal dari *syahriah* (iuran) santri maupun donasi pihak lain (Bisri dan Rufaidah 2002). Penguatan kemandirian ekonomi akan membebaskan pesantren dari predikat tersebut. Dengan demikian, pesantren tidak lagi menggantungkan pendanaan operasionalnya kepada pihak lain. Tercapainya kemandirian secara ekonomi merupakan tujuan yang diharapkan dari pemberdayaan ekonomi pesantren.

Kemandirian ekonomi pesantren adalah kemampuan pesantren dalam menjalankan operasionalnya tanpa bergantung pihak eksternal. Salah satu tolak ukurnya adalah bahwa unit usaha yang dimiliki pesantren tersebut memiliki kontribusi signifikan terhadap operasional pendidikan sehingga pesantren tidak terlalu tergantung pada iuran santri atau donasi dari pihak eksternal pesantren (Bank Indonesia 2015; Irfany 2016). Tujuan pengembangan kemandirian ekonomi pesantren tidak hanya untuk mewujudkan pertumbuhan

ekonomi yang inklusif tetapi juga untuk melahirkan sumber daya insani yang berakhlak mulia dan andal dalam bidang ekonomi (Bank Indonesia 2020).

Pemberdayaan ekonomi pesantren adalah serangkaian upaya ekonomi, manajerial, kelembagaan, dalam motivasi kewirausahaan dalam rangka menunjang kemandirian pesantren dalam ekonomi, yang muaranya akan menunjang tujuan pesantren yang lain sebagai fasilitator pendidikan, keagamaan, dan sosial (Kementerian Agama RI 2021).

Data Kementerian Agama (2021), mencatat terdapat 30.495 pesantren di Indonesia dengan jumlah santri dan pengajar sebanyak 4,3 juta orang dan 474 ribu orang. Angka yang besar ini menunjukkan bahwa pesantren bisa dianggap sebagai 'raksasa tidur' (*sleeping giant*) pengembangan industri halal (ekonomi syariah) baik dari sisi konsumsi maupun produksi. Tidak hanya bagi kemandirian ekonomi pesantren sendiri, pengembangan unit bisnis pesantren akan berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat sekitar. Dengan kata lain, pesantren dapat berperan sebagai agen pembangunan.

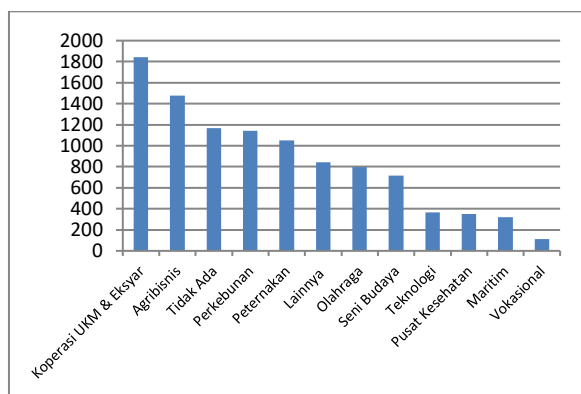
Dalam risalah ini, beberapa pesantren bisa dijadikan percontohan (*benchmarking*) kemandirian ekonomi melalui unit usaha pesantren yang berbasis pertanian yang dimilikinya.

## Pembahasan

Pesantren, dari sisi potensi sumberdaya dan unit usaha yang dimilikinya, merupakan aset potensial dalam pembangunan ekonomi. Unit usaha pesantren dapat melakukan produksi dan pemasaran produk halal nasional. Namun data mencatat hanya 33,4% dari total pesantren di Indonesia yang telah memiliki unit usaha (Kementerian Agama 2021). Angka ini mencerminkan potensi ekonomi pesantren

belum sepenuhnya dioptimalisasi oleh sebagian besar pesantren di Indonesia.

Kementerian Agama RI merilis data potensi ekonomi pesantren di Indonesia tahun 2021. Gambar 1 menunjukkan terdapat 10.185 pesantren yang telah memiliki entitas usaha. Adapun bidang usaha yang paling banyak digarap oleh pesantren adalah Koperasi dan UKM sebanyak 1.845 pesantren. Selain itu, jenis usaha agribisnis menempati posisi kedua sebagai jenis usaha yang paling banyak dikembangkan oleh pesantren, yaitu sebanyak 1.479 pesantren.



Gambar 1 Potensi ekonomi pesantren berbasis pertanian di Indonesia (sumber:Kementerian Agama 2021).

Informasi di atas mengindikasikan irisan yang kuat antara pesantren, pertanian, dan perdesaan, yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Tak dapat dipungkiri, salah satu sektor utama bisnis pesantren adalah pertanian, dan rata-rata pesantren adalah berada di perdesaan (Kementerian Agama 2021). Mengembangkan ekonomi ketiganya adalah hal yang bisa dicapai. Risalah kebijakan ini berupaya merekomendasikan strategi yang dapat dilakukan dalam mewujudkan kemandirian ekonomi pesantren berbasis pertanian berdasarkan beberapa kasus pesantren yang telah diteliti.

Terdapat beberapa studi terkait kemandirian ekonomi pesantren berbasis pertanian. Ramadini *et al.* (2022a dan 2022b), menganalisa strategi pengembangan unit usaha pesantren Pesantren Hidayatullah Depok yang

berbasis pertanian dengan menggunakan analisa struktur *Strength-Weakness-Opportunity-Threat* (SWOT) yang diolah dengan *Analytic Network Process (ANP)*. Hasil studi menunjukkan aspek kekuatan (*strength*) dan aspek peluang (*opportunity*) memiliki skor tertinggi dibandingkan aspek kelemahan (*weakness*) dan aspek ancaman (*threat*). Temuan ini diperkuat dengan nilai kesepakatan (*rater agreement*) sebesar 0.4645 yang menunjukkan *stakeholder* kunci pesantren (responden) bersepakat bahwa kekuatan dan peluang pengelolaan unit usaha oleh pesantren lebih dominan atau prioritas dibandingkan kelemahan dan ancamannya.

Analisa lebih mendalam, urutan kekuatan yang dimiliki pesantren adalah sebagai berikut; i) Terbangunnya kolaborasi pesantren baik dengan para pihak baik internal maupun eksternal dalam pengembangan usaha pertanian; ii) Kedalaman pemahaman syariah yang ditunjang mentalitas dan spiritualitas unsur-unsur pesantren; iii) Kepemimpinan dan motivasi kiai dalam pengembangan ekonomi pesantren; iv) Kuantitas sumberdaya insani (santri dan masyarakat sekitar) sebagai modal ekonomi; v) Kesesuaian bidang usaha (pertanian) dengan potensi sumberdaya ekonomi setempat; dan vi) inklusifitas pesantren dan kekuatan modal sosial (*social capital*) dalam berinteraksi dengan masyarakat.

Adapun urutan aspek kelemahan yang masih dimiliki pesantren yaitu sebagai berikut; i) belum optimalnya pengelolaan pemasaran produk (*marketing management*); ii) Pergantian pengelola unit usaha sehingga menghambat regenerasi SDM; iii) Kurang memadainya sarana-prasarana pendukung unit usaha; iv) Profesionalisme manajemen bisnis yang masih rendah; v) Permodalan yang masih terbatas, dan vi) Belum memadainya manajemen risiko pengelolaan unit usaha.

Dari aspek peluang, urutannya adalah sebagai berikut; i) Peluang pesantren sebagai produsen dalam menyuplai kebutuhan masyarakat (produksi pertanian); ii) Tingginya

kepercayaan masyarakat terhadap pesantren sebagai *social capital*; ii) Adanya berbagai program inisiatif dari pemerintah; dan ix) Gaya hidup halal (*halal lifestyle*) di lingkungan pesantren sehingga pesantren hanya memproduksi dan mengkonsumsi yang halal dan *thayyib* (baik).

Terakhir, terdapat dua ancaman bisnis pesantren sebagai berikut. Pertama, semakin ketatnya tingkat kompetisi dengan semakin banyaknya pesaing usaha baik lokal maupun jaring bisnis nasional. Kedua, semakin tingginya risiko kerugian usaha karena kepastian pasar (baik pasar input dan pasar hasil) dan risiko fluktuasi harga (inflasi).

Dari Analisa SWOT, dapat disintesis strategi pengembangan unit bisnis pesantren. Urutan strategi yang perlu dilakukan sebagai berikut; i) peningkatan kualitas SDM misalnya melalui *training* dan *mentoring*; ii) strategi *marketing* secara lebih terintegrasi; iii) peningkatan *good governance* dan budaya organisasi secara lebih profesional; iv) sinkronisasi program ekonomi pesantren dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal; v) penguatan sinergi antar pesantren dan kerjasama dengan berbagai *stakeholder* penting; vi) penguatan literasi dan adopsi teknologi, termasuk membangun *virtual market*; vii) peningkatan monitoring dan evaluasi unit usaha; dan viii) penguatan dan perluasan akses permodalan.

Dalam kasus unit bisnis usaha pesantren berbasis pertanian yang lain, Muttaqin (2011) melakukan penelitian mengenai kemandirian ekonomi Pondok Pesantren Al-Ittifaq Ciwidey. Hasil studi menunjukkan bahwa salah satu kunci keberhasilan program kemandirian ekonomi pondok pesantren adalah keterlibatan santri dalam aktifitas usaha ekonomi pesantren yang bergerak dalam sektor agribisnis. Di samping itu, terdapat hubungan positif antara inspirasi dan kepemimpinan Kiai serta motivasi spiritual para santri terhadap kemandirian ekonomi pesantren. Hubungan positif juga ditunjukkan

oleh *mentoring* dan pelatihan yang dilakukan pengurus Pesantren Al-Ittifaq terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam hal ini, satu sisi pembelajaran positif adalah bahwa Pesantren Al Ittifaq melibatkan masyarakat sekitar baik sebagai penyedia lahan pertanian dan tenaga kerja, baik sistem sewa atau bagi hasil.

Demikian pula hasil penelitian Silvana dan Lubis (2019) untuk kasus Pesantren Al-Ittifaq yang menunjukkan bahwa kemandirian ekonomi Pesantren dapat diklasifikasi ke dalam 4 aspek penting yang sinergis yakni institusi, aspek teknis (produksi agribisnis), sinergitas dengan pemangku kepentingan, dan aspek pasar. Hasil analisis menunjukkan bahwa aspek pasar merupakan aspek yang berpengaruh paling dominan dalam pengembangan bisnis pesantren. Aspek ini diperkuat dengan adanya kerjasama Al Ittifaq dengan jaringan *supply chain* produk sayuran, termasuk jaringan ritel modern dan adanya Alif Mart (Al Ittifaq Mart). Terakhir, empat faktor yang paling berpengaruh untuk masing-masing aspek adalah: kepemimpinan (*mindset* wirausaha pertanian) kiai dan pengelola pesantren, permodalan, sistem informasi produksi, dukungan permodalan, dan ketersediaan serta kepastian pasar.

## Implikasi dan Rekomendasi

Pesantren memiliki potensi yang lebih dari memadai untuk dijadikan salah satu basis pemberdayaan ekonomi pertanian. Dalam rangka meraih kemandirian ekonomi pesantren, diperlukan suatu entitas bisnis milik pesantren yang mampu memproduksi dan menjual produk/jasa yang khas dan memiliki keunggulan pasar (*one product* khas pesantren), dimana hasil usahanya bisa digunakan seluas-luasnya untuk kesejahteraan pesantren baik santri, pengurus, dan masyarakat sekitar.

Oleh karena itu, diperlukan strategi pengembangan kapasitas ekonomi pesantren



khususnya dalam mencapai identifikasi dan soliditas dan sustainabilitas produksi pertanian, kesinambungan operasional produksinya, termasuk aspek manajerial dan kelembagaannya.

Pesantren yang 'unggul' secara ekonomi adalah pesantren memiliki entitas bisnis sendiri yang terpisah dari entitas pelaporannya dengan bisnis pribadi di pesantren (Irfany 2016; Bank Indonesia 2020). Pesantren harus menghasilkan produk atau jasa yang memiliki keunggulan kompetitif, ditunjang oleh *market place*. Hasil usaha digunakan untuk kepentingan ekonomi pesantren. Di samping itu, sustainabilitas usaha baik dari sisi SDM, manajemen, kelembagaan, dan lingkungan perlu terus diperhatikan.

Pasar merupakan aspek utama dalam pengembangan bisnis pesantren. Oleh karena itu diversifikasi produk dan perluasan jaringan pemasaran baik secara *online* maupun *offline* dapat dipertimbangkan untuk mengembangkan pasar produk pertanian pesantren. Dari sisi pesantren, pembentukan divisi *quality control* untuk memeriksa kualitas produk pertanian yang akan dikirim ke pasar sesuai dengan kualitas yang ditentukan.

Dalam meningkatkan kinerja kelembagaan dan SDM, diperlukan program edukasi dan pelatihan agribisnis. Peranan *agro-sociopreneurships* berbasis pesantren sangat diperlukan. IPB University, sebagai universitas berbasis pertanian, misalnya telah melakukan upaya yang baik seperti pengembangan program *santripreneur* (wirausahawan santri). Demikian pula Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur sudah memiliki program unggulan yaitu *One Pesantren One Product* (OPOP). Demikian pula program Program Pengembangan Kemandirian Ekonomi Pesantren (Bank Indonesia), pembentukan Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren (HEBITREN), dan berbagai program dan terobosan inovatif sejenis bisa terus dilakukan dalam memperkuat dan meningkatkan kemandirian ekonomi pesantren.

## Daftar Pustaka

- [BI] Bank Indonesia. 2020. Direktori Program Pengembangan Kemandirian Ekonomi Pesantren 2020. Jakarta (ID): Bank Indonesia.
- [BI] Bank Indonesia. 2015. Identifikasi Key Success Factor Lembaga Pesantren. Jakarta (ID): Bank Indonesia.
- Bisri H, Rufaidah E. 2002. *Model Penelitian Agama dan Dinamika Sosial*. Jakarta (ID), Rajagrafindo Persada.
- Brodjonegoro B. 2019. Kontribusi Santri dan Pesantren untuk Capai Pembangunan Inklusif dan Tujuan 14 SDGs. Jakarta (ID): SDG's Annual Conference; 2019 Oktober 8.
- Irfany MI. 2016. Pemberdayaan Kemandirian Pesantren. FGD Roadmap Pengembangan Kemandirian Ekonomi Pesantren. Bank Indonesia. Jakarta, 9-11 October 2016.
- [Kemenag] Kementerian Agama. 2020. Pangkalan Data Pendidikan Pondok Pesantren. Jakarta (ID): PDPP.
- [Kemenag] Kementerian Agama. 2020. Data Statistik Pendidikan Islam Pondok Pesantren. Jakarta (ID): EMIS Pendis.
- [Kemenag] Kementerian Agama. 2003. Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah. Jakarta (ID): Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam.
- [Kementerian PPN/Bappenas] Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2018. Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024. Jakarta (ID): Kementerian PPN/Bappenas.

- Marlina. 2014. Potensi Pesantren dalam Pengembangan Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum Islam*. 12(1): 117-134.
- Mutafarida B, Sariati NP. 2019. Peran Pesantren dalam Memenuhi Kebutuhan Industri Halal LifeStyle. Malang (ID), Proceeding International Conference on Islamic Education (ICIED), 4(1): 109-115; 2019 November 6-7.
- Muttaqin R. 2011. Kemandirian dan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Pesantren (Studi Atas Peran Pondok Pesantren Al-Ittifaq Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung Terhadap Kemandirian Ekonomi Santri dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sekitarnya). *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia (JESI)*.1(2): 91-92
- Nadrattuzaman. 2019. KNKS Mendorong Peran Pesantren dalam Industri Halal. Palembang (ID), Sharia Economics Forum; 2019 Agustus 2.
- Nadzir M. 2015. Membangun Pemberdayaan Ekonomi di Pesantren. *Jurnal Economica*. 6(1): 37-56.
- Nasir MR. 2005. Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal, Pondok Pesantren di Tengah Arus Perubahan. Yogyakarta (ID): Pustaka Pelajar.
- Prasetyo MAM. 2017. Manajemen Unit Usaha Pesantren. HIKMAH: *Jurnal Pendidikan Islam*. 6(1): 18-36.
- Rifa'i M. 2019. Manajemen Ekonomi Mandiri Pondok Pesantren dalam Mewujudkan Kualitas Layanan Pendidikan. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan*. 3(1): 30-44.
- Ramadini, K.N, N. Hasanah, M.I. Irfany. 2022a. Strategi Pengembangan Unit Usaha Pesantren dengan Pendekatan ANP-SWOT (Studi Kasus Pondok Pesantren Hidayatullah Depok). Skripsi. IPB University.
- Ramadini, K.N, N. Hasanah, M.I. Irfany. 2022b. Strategi Pengembangan Unit Usaha Pondok Pesantren. *Iqtishodia Journal Ekonomi Islam Republika*. 27 Mei 2022. (diakses pada 2022 Jun 28). Tersedia pada: <https://www.republika.id/posts/28388/strategi-pengembangan-unit-usaha-pondok-pesantren>
- Rimbawan Y. 2012. Pesantren dan Ekonomi: Kajian Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Darul Falah Bendo Mungal Krian Sidoarjo Jawa Timur. Surabaya (ID), Conference Proceedings: Annual International Conference on Islamic Studies XII; 2012 November 5-8.
- Ryandono MNH. 2018. Peran Pondok Pesantren dalam Pemberdayaan Sosial Ekonomi di Jawa Timur pada Abad ke-20. *Mozaik Humaniora*. 18(2): 189-204.
- Saaty TL, Vargas LG. 2006. Decision Making with the Analytic Network Process: Economic, Political, Social and Technological Applications with Benefits, Opportunities, Costs and Risks. Pittsburgh (US), Springer.
- Silvana M, Lubis D. 2021. Faktor yang Memengaruhi Kemandirian Ekonomi Pesantren (Studi Pesantren Al-Ittifaq Bandung). *Jurnal Al-Muzara'ah*. 9(2): 129-146.
- Suwito NS. 2017. Model Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*. 6(3): 18-36.
- Usman MI. 2013. Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam (Sejarah Lahir, Sistem Pendidikan, dan Perkembangannya Masa Kini). *Jurnal Al Hikmah*. 14(1): 127-146.

[UU RI] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren. 2019. Bentuk acuan: Pasal 1 Bab 1, Pasal 3 Bab 2 UU (2019).

World Population Review. 2020. Muslim Population by Country 2020 [Internet]. (diakses pada 2021 Des 23). Tersedia pada: <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/muslim-population-by-country>



**Direktorat  
Publikasi Ilmiah  
dan Informasi Strategis**

Direktorat Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis IPB (DPIS IPB) melaksanakan tugas dalam mengkaji dan mengelola informasi terkait isu-isu strategis untuk meningkatkan peran IPB dalam kebijakan pertanian, kelautan dan biosains tropika, serta mendorong peningkatan publikasi ilmiah untuk mendukung IPB menjadi World Class University.

**Direktorat Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis (DPIS), IPB University**  
Gedung LSI Lantai 1, Jl. Kamper, Kampus IPB Dramaga, Bogor - Indonesia 16680  
Website: <https://dpis.ipb.ac.id>

